

# **LAPORAN KINERJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
DINAS PERIKANAN  
Jl. Jenderal Sudirman No.52 Kode Pos. 38616  
ARGA MAKMUR**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan sesuai dengan fungsinya, pembangunan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang sejahtera melalui pengelolaan sumberdaya perikanan yang aman, lestari dan berdaya saing.

Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam penyusunan ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021 berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Perikanan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perikanan.

Evaluasi capaian kinerja secara ringkas baik keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian setiap sasaran, dapat diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara  
Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Meningkatnya Kinerja Pembinaan Akuntabilitas kinerja	Nilai/predikat AKIP SKPD	BB	B	-	Realisasi yang digunakan adalah capaian Tahun 2021 masih menggunakan data yang lama dikarenakan data terbaru belum di edarkan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara.
2.	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Pada sektor perikanan tangkap, budidaya dan produk olahan perikanan	Persentase pertumbuhan Produksi Perikanan Pertahun	1,55 %	1,55 %	100%	Realisasi yang digunakan adalah sesuai dengan data statistik Dinas Perikanan Tahun 2021.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah dan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karuniaNya, penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan tepat waktu laporan kinerja instansi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara disusun berdasarkan realisasi kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja semester 1.

Tahun 2021 berisi tentang analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas sasaran yang ditetapkan dalam Rencana strategik Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021, kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam menyajikan informasi kinerja secara lengkap dan sempurna, untuk itu semua masukan berupa saran dan kritik konstruksi dari berbagai pihak kami menyambut baik.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara menjadi media informasi tentang pelaksanaan pembangunan dan menjadi bahan evaluasi kinerja demi pencapaian dan kesinambungan pemangunan demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara.

Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian misi dan tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2021, maka Dinas Perikanan membuat Laporan Kinerja dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan, khususnya bagi semua unit kerja yang ada untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing di masa yang akan datang.

Arga Makmur, 28 Januari 2022

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Bengkulu Utara

SUGIMIN, S.Pd., M.Pd  
NIP 19661103 198612 1 003

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum.....	4
C. Gambaran Organisasi .....	4
D. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	12
A. Perencanaan Strategis .....	12
B. Perjanjian Kinerja .....	24
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	28
A. Pencapaian Kinerja Sasaran .....	28
B. Akuntabilitas Keuangan .....	37
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	40
A. Kesimpulan .....	40
B. Saran-Saran .....	40

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Jumlah ASN Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Menurut Pangkat / Golongan Tahun 2020 .....	7
2. Data ASN Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Menurut Pendidikan Formal .....	7
3. Data Pegawai Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Menurut Pendidikan Perjenjangan .....	8
4. Program dan Kegiatan .....	19
5. Indikator Kinerja Utama .....	24
6. Indikator kinerja pada sasaran 1 .....	28
7. Dana Alokasi Khusus Dak .....	29
8. Indikator Kinerja pada Sasaran 2 .....	33
9. Program dan kegiatan pendukung pelaksanaan sasaran ke 2 .....	37
10 Realisasi keuangan program dan kegiatan APBD .....	38
11 Realisasi keuangan program dan kegiatan DAK.....	39

## **DAFTAR GAMBAR**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu daerah di wilayah Provinsi Bengkulu dan ber ibukota di Arga Makmur dengan luas 4.324,60 Km<sup>2</sup>, terletak dibagian Pantai Barat Sumatera yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Secara geografis Kabupaten Bengkulu Utara terletak pada posisi 101°32' - 102°8' BT dan 2°15 - 4° LS. Kabupaten Bengkulu Utara terletak di bagian utara Provinsi Bengkulu berbatasan dengan :

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Muko-muko.
- sebelah selatan berbatasan dengan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Jambi.
- sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kondisi geografis daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian 150 m dpl yang terdapat dibagian barat membujur searah pantai dari selatan ke utara, sedangkan dibagian timur berbukit-bukit dengan ketinggian 541 dpl, sedangkan secara hidrologis di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara mengalir kurang lebih 91 buah sungai yang berhulu disisi timur bukit barisan dan mengalir ke Samudera Indonesia.

Pengelolaan sumber daya perikanan perlu ditingkatkan terus untuk menopang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan demi kemakmuran masyarakat Bengkulu Utara yang sejalan dengan visi pembangunan perikanan Kabupaten Bengkulu Utara “ *Terwujudnya Masyarakat Perikanan yang Maju*



*dan Sejahtera Serta Sumber Daya Manusia yang Profesional dengan Memanfaatkan Sumber Daya Perikanan Secara Bijaksana dan Berkelanjutan”.*

Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Perikanan menerapkan arah kebijakan antara lain meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, pengawasan perikanan, serta penyediaan sarana prasarana pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dengan peningkatan produksi perikanan terutama pada daerah yang memiliki potensi dan sudah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan perikanan (minapolitan), yang didukung dengan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan dan penguatan statistik perikanan.

Pemerintahan dapat dikatakan baik apabila pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat diukur dengan parameter yang jelas terkontrol dan dapat dianalisa pencapaiannya berdasarkan *feedback* dari produk yang dihasilkan terhadap input perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran utama dalam satu tahun dan apa kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut serta apa langkah-langkah yang telah ditempuh dalam menghadapi kendala dan hambatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberadaan Dinas Perikanan sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintahan daerah menyajikan Laporan kinerja yang merupakan pelaksanaan kewenangan otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang perikanan yang meliputi Sekretariat, bidang pemberdayaan nelayan kecil, bidang perizinan dan pembinaan pelaku usaha,

bidang pemberdayaan pembudidaya ikan, unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan dan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, tata kerja dan eselon jabatan Dinas Perikanan tipe B.

Dalam pemerintahan, tata pemerintahan yang baik (good governance) ditunjukkan dari pelaksanaan kegiatan yang baik dan sesuai dengan perencanaan kegiatan, pengelolaan anggaran yang tertib, dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Asas akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung-jawaban penyelenggaraan negara kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara dalam pencapaian target kinerja tahun 2021, dalam upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021, antara lain :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5) Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

## **C. Gambaran Organisasi**

### **I. Organisasi Perangkat Daerah**

Keberadaan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara diatur berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 60 Tahun 2016 adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Kabupaten Bengkulu Utara dibidang Perikanan yang telah diserahkan pemerintah. Sebagai suatu

organisasi pemerintah dibidang perikanan yang diharapkan mampu turut serta mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah digariskan.

Tugas pokok Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah Kabupaten Bengkulu Utara bidang Perikanan yang telah diserahkan oleh pemerintah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara berfungsi :

1. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan
2. Pengkoordinasian program dan kegiatan
3. Pelaksanaan urusan pelayanan umum dibidang perikanan
4. Pelaksanaan dan pembinaan tugas kesekretariatan Dinas Perikanan
5. Pelaksanaan dan pembinaan tugas di bidang Perikanan
6. Pengendalian kebijakan teknis, program dan kegiatan
7. Evaluasi dan pelaporan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan unit-unit kerja yang ada pada Dinas Perikanan dan secara organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

1. Sekretariat
2. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil
3. Bidang Perizinan dan Pembinaan Pelaku Usaha
4. Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan dan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, tata kerja dan eselon jabatan tersebut seperti dibawah ini :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi :
  - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
  - b. Sub bagian perencanaan dan keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil membawahi :
  - a. Seksi pendidikan, pelatihan dan pendampingan nelayan
  - b. Seksi fasilitas dan data kenelayanan
  - c. Seksi penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan kemitraan usaha
4. Bidang Perizinan dan Pembinaan Pelaku Usaha membawahi :
  - a. Seksi perizinan usaha perikanan, tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan dan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup
  - b. Seksi teknologi dan peningkatan mutu produk
  - c. Seksi data, informasi dan pembinaan kelembagaan.
5. Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan membawahi :
  - a. Seksi perencanaan kawasan, fasilitas dan data budidaya
  - b. Seksi pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan dan mutu pakan
  - c. Seksi produksi budidaya dan pembenihan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

## II. Sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jumlah ASN Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara per Desember 2021 adalah 35 Orang, apabila dilihat menurut Pangkat/ Golongan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel I. Jumlah ASN Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara menurut Pangkat/Golongan Tahun 2021

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	10 orang	
2	Golongan III	23 orang	
3	Golongan II	2 orang	
4	Golongan I	-	

Data Pegawai Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara menurut pendidikan :

### a. Pendidikan Formal

Tabel 2. Data ASN Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara menurut Pendidikan Formal

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Ket.
1	Strata 3 (S3)	-	
2	Strata 2 (S2)	3	
3	Strata 1 (S1) / Diploma IV (D-IV)	25	
4	Diploma III (D-III)	3	
5	Diploma II (D-II)	-	
6	Diploma I (D-I)	-	
7	SLTA	4	
8	SMP	-	
9	SD	-	
	Jumlah	35	

b. Pendidikan Penjurangan :

Hingga Desember Tahun 2021 Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara yang telah mengikuti Pendidikan Penjurangan berjumlah 11 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Data Pegawai Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara menurut Pendidikan Penjurangan

No	Jenis Pendidikan Penjurangan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	SPATI	-	
2	Spamen/Diklatpim II	1	
3	Spama/Diklatpim III	7	
4	Spada/Adum/Diklatpim IV	3	
	Jumlah	11	

### III. Isu – Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam upaya pengembangan dan pengelolaan potensi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya mengalami beberapa kendala yaitu :

1. Pada bidang perikanan tangkap nelayan kecil mengalami kesulitan dalam meningkatkan produksi/hasil tangkapan ikan disebabkan oleh :
  - Kondisi cuaca yang tidak menentu (sering badai) menyebabkan jumlah melaut lebih sedikit.
  - Sebagian besar armada penangkapan yang dipakai berukuran kecil yang beroperasi *one day fishing* dengan jangkauan *fishing ground* lebih dekat dan jumlah alat tangkap yang terbatas serta kurang bervariasi.

- Belum beroperasinya TPI dan PPI secara optimal serta keterbatasan permodalan kurang mendorong kemajuan usaha penangkapan ikan.
  - Kurangnya investor dibidang usaha penangkapan ikan yang menanamkan modal.
  - Kualitas SDM masih rendah.
  - Masih kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap.
2. Pada bidang perikanan budidaya mengalami kesulitan dalam meningkatkan produksi ikan air tawar disebabkan oleh :
- Masih rendahnya IPTEK pembudidaya ikan
  - Belum optimalnya sarana pembenihan, baik BBI maupun UPR sehingga belum didapatkannya benih yang bermutu tinggi , dengan jumlah yang cukup dan berkelanjutan.
  - Biaya produksi untuk kegiatan budidaya cukup besar (harga pakan ikan/pellet relatif mahal) sedangkan permodalan yang dimiliki terbatas.
  - Lemahnya sistem pemasaran ikan budidaya.
  - Masih kurangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya.
3. Terjadinya Refocusing Anggaran kegiatan untuk Tahun 2020 dikarenakan wabah Covid -19 yang mengakibatkan terhambatnya proses pengembangan pembangunan di bidang perikanan.

Adapun isu – isu strategis tersebut antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana perikanan tangkap, perikanan budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
2. Mahalnya harga pelet dan obat-obatan untuk budidaya ikan
3. Sarana prasarana TPI belum tersedia lengkap



4. Rendahnya tingkat konsumsi ikan per kapita.
5. Belum tersedianya sarana prasarana transportasi produk perikanan sehingga hasil perikanan belum terdistribusi dengan baik
6. Degradasi lingkungan pesisir laut dan garis pantai serta penurunan stok ikan.
7. Keterbatasan modal usaha baik usaha dibidang penangkapan ikan maupun budidaya ikan air tawar.
8. Minimnya investor yang menanamkan modalnya dibidang perikanan tangkap, perikanan budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
9. Rendahnya kualitas SDM Perikanan dan penerapan IPTEK dalam aktivitas perikanan.
10. Rendahnya penyerapan tenaga kerja bidang perikanan.
11. Keterbatasan sarana dan operasional dalam memproduksi benih ikan unggul.
12. Masih kurangnya sarana prasarana perikanan tangkap, budidaya maupun pengolahan dan pemasaran

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021 ini disusun menjadi empat bab dengan urutan sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Gambaran Organisasi
- D. Sistematika Penulisan

## **BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Perencanaan Strategis
- B. Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN**

- A. Pencapaian Kinerja Sasaran
- B. Akuntabilitas Keuangan

## **BAB IV. PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Perencanaan strategi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara untuk menciptakan komitmen dalam rangka pembangunan sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik dan untuk memberi arah dan pedoman Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa system perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara pembangunan perencanaan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam rangka panjang menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Salah satu rencana pembangunan yang perlu disusun adalah Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat Daerah yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional dan pasal 25 ayat 2 dan 3 yang antara lain menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara merupakan perangkat pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas tentu mempunyai perencanaan strategi dalam pengertian dan pelaksanaan tugasnya. Dengan keberadaan sebagai unsur daerah tentu akan memberikan rincian atas program kegiatan yang bertanggung jawab dan dapat terukur baik kemajuan maupun kelemahannya, sehingga akhirnya dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara adalah Dokumen yang memuat suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan cara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada, penyusunan Renstra disamping mengacu pada RPJMD, juga perlu memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap Renstra pada 5 (lima) Tahun sebelumnya.

- **Pernyataan Visi dan Misi Kabupaten Bengkulu Utara**

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin di capai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi disaat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi kondisi saat ini dan masa depan yang ingin di capai.

Misi adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal

instansi pemerintahannya serta mengetahui peran dan program-programnya untuk menentukan keberhasilan dimasa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan mengacu pada keberadaan sebagai unsur daerah yang mengemban tugas dengan berbagai upaya untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara dari berbagai sektor, maka visi dan misi Kabupaten Bengkulu utara adalah sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Utara Adil dan Sejahtera didukung Sumber Daya Manusia Berkualitas Bertumbuh Pada Pariwisata Perikanan.

Misi : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Melalui sektor Pariwisata yang di Dukung oleh perikanan

Visi Misi yang memiliki Makna :

\*Masyarakat Adil :

Suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang telah mencapai suatu tingkatan keadilan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Masyarakat memperoleh apa yang menjadi haknya dan apa yang seharusnya diterima olehnya, sehingga masyarakat dapat menjalankan kewajibannya. Masyarakat memperoleh hak bebas berpendapat, hak memperoleh hidup aman dan tertib, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak bebas menunaikan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

\* Masyarakat Sejahtera :

Suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan batin dalam berbagai aspek,

memiliki rasa aman damai dan tenteram serta memiliki daya saing, serta adanya keserasian dan keharmonisan lingkungan sekitarnya baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Kondisi masyarakat adil dan sejahtera tercipta oleh pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good government*) yaitu pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, bersih, melayani, efektif dan efisien yang didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional serta menerapkan organisasi yang modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan penerapan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan kaidah-kaidah lingkungan secara konsisten

\* SDM Berkualitas :

Suatu kondisi sumberdaya manusia Kabupaten Bengkulu Utara yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang serta sektor pembangunan

\* Bertumbuh :

- Maju : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur daerah, kualitas sumber daya manusia serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

- Mandiri : Masyarakat yang mampu memcukupi kebutuhannya dengan layak, mampu mengembangkan potensi dan menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, penjelasan pengertian atau makna visi dan misi merupakan kemampuan untuk melihat inti persoalan, pendapat atau wawasan, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 60 Tahun 2016, Dinas Perikanan mendapatkan wewenang dan tanggung jawab terhadap misi 4 (empat) Kepala Daerah yaitu membangun ekonomi kerakyatan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perikanan.



- **Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran, Kebijakan dan Program**

Tujuan adalah pernyataan pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan Daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi perangkat daerah, dengan di formulasiannya tujuan berdasarkan visi dan misi yang di emban. Sebelum menetapkan tujuan dan sasaran maka lebih dahulu dirumuskan faktor- faktor kunci keberhasilan yang menjadi kunci dalam menetapkan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan melihat *Strenght, Weakness, Opportunities* dan *Threatths* (SWOT). Selanjutnya analisis diarahkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya.

Faktor-faktor keberhasilan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Tersedianya sumberdaya manusia perikanan yang memadai (kualitas dan kuantitas)
- b. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan
- c. Adanya uraian tugas yang jelas dan pedoman kerja yang memadai
- d. Adanya komitmen yang kuat baik pemerintah maupun masyarakat perikanan dalam mewujudkan cita-cita nasional dan daerah.
- e. Adanya perangkat atau produk hukum yang jelas dan tegas baik untuk pengelola maupun terhadap pelanggaran pemanfaatan sumberdaya perikanan (SDKP) dan bahan pengolahan hasil perikanan yang berbahaya bagi kesehatan.



## **1. Tujuan**

Sesuai dengan visi dan misi tersebut maka tujuan pembangunan perikanan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan
- b. Memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan
- c. Meningkatkan penerimaan daerah dan devisa negara dari hasil perikanan
- d. Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan serta masyarakat pesisir lainnya
- e. Meningkatkan kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan
- f. Meningkatkan penerapan informasi teknologi serta kelembagaan
- g. Meningkatkan kinerja yang profesional aparat Dinas Perikanan.

## **2. Sasaran dan Indikator Sasaran**

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan perikanan di Bengkulu Utara, sasaran yang akan dicapai pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan
- b. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perikanan tangkap, budidaya dan produk olahan perikanan Adanya peningkatan jumlah kelompok pembudidaya ikan serta meningkatnya produksi perikanan budidaya.
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi.

Sedangkan untuk indikator sasarannya adalah :

- a. Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan
- b. Nilai/predikat AKIP SKPD

Berdasarkan sasaran diatas maka kebijakan – kebijakan strategis Dinas Perikanan kabupaten Bengkulu Utara antara lain :

1. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap
2. Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap
3. Penyediaan sarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah
4. Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat
5. Penyediaan dan penyaluran bahan baku industry pengelolaan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota
6. Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala Mikro dan Kecil dalam satu daerah Kabupaten/ Kota.

### 3. Program Dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan, sasaran dan kebijakan strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara, maka program dan kegiatan akan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja Perangkat Daerah	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Adminsitration Barang Milik Daerah pada Perangkat	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

	Daerah Kabupaten/Ko ta Daerah.	Daerah	
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan bahan Logistik kantoor 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 4. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Penyediaan jasa penunjang urusan	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa pelayanan

	Daerah Kabupaten/Ko ta	pemerintah daerah	umum kantor
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
8.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan penangkapan ikan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	1. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

		yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
9.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Budidaya ikan	<p>1. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2. Pembinaan dan Pemantauan pembudidayaan ikan di darat</p>
10	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industry pengelolaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1. Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota.

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka indikator kinerja utama (key performance indicator) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 5 : Indikator Kinerja Utama

Sasaran	Indikator		Formula Pengukuran
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditas Perikanan Untuk Mencapai Kedaulatan Makanan	1.	Produksi Perikanan Tangkap	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}}$
	2.	Produksi Perikanan Budidaya	$\frac{\text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}}$
	3.	Konsumsi Ikan	$\frac{\text{Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kpt)}}{\text{Target Daerah (kg/kpt)}} \times 100$
	4.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	$\frac{\text{Jumlah kelompok Nelayan yang mendapatkan Bantuan}}{\text{Jumlah kelompok Nelayan}} \times 100$

#### B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kerja merupakan tekad dan janji kinerja Tahunan yang akan di capai antara pihak yang menerima amanah / tanggung jawab. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh organisasi akan dapat berguna untuk perencanaan prioritas kegiatan yang di biayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut di harapkan focus dalam

mengarahkan dan mengelolah program atau kegiatan perangkat daerah akan lebih baik sehingga mencapai program dan kegiatan yang terarah.

Perjanjian kinerja tahun 2021 merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara yang memuat target indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan. Berikut perjanjian kinerja Kepala Dinas Perikanan dengan Bapak Bupati Bengkulu Utara :



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI  
DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BENGKULU UTARA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUGIMIN, S.Pd. M.Pd**  
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara  
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. H. MIAN**  
Jabatan : Bupati Bengkulu Utara  
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada Tahun 2021 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arga Makmur,            Desember 2021

**Pihak Kedua,**  
Bupati Bengkulu Utara,

**Pihak Pertama,**  
Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Bengkulu Utara

**Ir. H. MIAN**

**SUGIMIN, S.Pd. M.Pd**  
**NIP. 196611031 198612 1 001**

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKULU UTARA**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2022</b>
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai /Predikat AKIP SKPD	BB
2.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi bidang tangkap kenelayanan, budidaya perikanan, serta produk olahan perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sector perikanan	1,55 %

<b><u>Program pendukung indikator kinerja</u></b>		<b><u>Anggaran (Rp)</u></b>	<b><u>Keterangan</u></b>
1	Program Penunjang urusan pemerintah Daerah kab. Kota/daerah	3.545.908.100,-	APBD
2	Program Pengelolaan perikanan tangkap	630.231.459,-	APBD
3	Program Pengelolaan Perikanan Budi daya	862.692.884,-	APBD
4	Program Pengelohan dan pemasaran hasil perikanan	24.093.862,-	APBD

***Pihak Kedua,***

Bupati Bengkulu Utara,

**Ir. H. MIAN**

***Pihak Pertama,***

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Bengkulu Utara

**SUGIMIN, S.Pd. M.Pd**  
**NIP. 196611031 198612 1 001**

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN**

**A. Pencapaian Kinerja Sasaran**

Pengukuran capaian kinerja mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA.

**MISI 3 RPJMD : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Ekonomi Kerakyatan**

**SASARAN 1 SKPD : Meningkatkan Kinerja Pembinaan Akuntabilitas kinerja**

Dalam sasaran ini terdapat satu (satu) indikator kinerja utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan /formula tertentu. Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran kedua akan diuraikan pada tabel 8 (delapan) berikut :

Tabel 6. Indikator Kinerja Pada Sasaran 1. Meningkatnya Kinerja Pembinaan akuntabilitas Kinerja.

URAIAN	SATUAN	TARGET TA.2021	REALISASI		% CAPAIAN 2021
			TA. 2020	TA. 2021	
Nilai/predikat Inspektorat SKPD	100%	BB	B	B	100

*Sumber : Data statistik Perikanan Tahun 2021*

Realisasi yang digunakan adalah capaian Tahun 2021 dikarenakan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara tidak melaksanakan reuiu terhadap dokumen Inspektorat Tahun 2021 akibat reconfusing anggaran terkait pandemi

covid-19, namun demikian Dinas Perikanan Bengkulu Utara tetap optimis mendapatkan nilai BB dengan range nilai berkisar diantara 70 – 80.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan bidang kelautan dan perikanan sejumlah Rp. 1.260.000.000,- ( Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 7. Berikut :

Tabel 7. Dana Alokasi Khusus (DAK)

No	Nama Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Pembangunan/ Rehabiltasi Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/ Kota) Penyediaan calon induk unggul beserta pakan calon induk unggul di lokasi BBI Kecamatan Argamakmur dengan 2 paket.	100.000.000,-	99.612.800,-
2	Pembangunan/ Rehabiltasi Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/ Kota) Budidaya Pakan Alami dilokasi BBI di Kecamatan Arga Makmur dengan 1 paket.	45.000.000,-	44.767.800,-
3	Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil. Perahu/kapal penangkap ikan untuk peralatan laut berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta Mesin, alat penangkapan ikan dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dilokasi Kecamatan Air	300.000.000,-	298.540.000,-

	Napal satu koperasi dengan 2 paket.		
4	Alat penangkapan ikan ramah lingkungan ( Kecamatan Enggano dengan 1 kelompok usaha bersama Kecamatan Putri Hijau dengan 1 Koperasi dengan nilai Rp. 20.000.000,-	20.000.000,-	19.943.000,-
5	Alat penangkapan ikan ramah lingkungan Kecamatan Air Napal dengan 2 kelompok usaha bersama.	40.000.000,-	39,886.000,-
6	Alat penangkapan ikan ramah lingkungan di Kecamatan Batik Nau dengan 1 kelompok usaha bersama	20.000.000,-	19.943.000,-
7	Alat penangkapan ikan ramah lingkungan Kecamatan Putri Hijau dengan 1 Koperasi dengan nilai	20.000.000,-	19.943.000,-
8	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin) Kecamatan Kerkap 1 Pokdakan dengan satu paket.	55.000.000,-	54.661.250,-
9	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana dan	55.000.000	54.661.250

	Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin) Kecamatan Air Besi, 1 Pokdakan dengan 1 paket.		
10	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin) Kecamatan Hulu Palik satu Pokdakan dengan 1 paket,	55.000.000,-	54.196.100,-
11	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin) Kecamatan Arga Makmur 1 Pokdakan dengan 3 paket,	165.000.000,-	163.518.600,-
12	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin) Kecamatan Arma Jaya 1 Pokdakan dengan 1 paket,	55.000.000,-	54.661.250,-
13	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha	55.000.000,-	54.661.250,-

	pembudidaya ikan skala kecil (Sarana dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin) Kecamatan Giri Mulya satu Pokdakan dengan 2 paket,		
14	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin) Kecamatan Padang Jaya satu Pokdakan dengan 1 paket,	109.322.500,-	109.322.500,-
15	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin) Kecamatan Ketahun satu Pokdakan dengan 1 paket.	55.000.000,-	54.196.100,-
16	Kegiatan Fisik Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (Sarana dan Prasarana Budidaya ikan air tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin) Kecamatan Pinang raya satu Pokdakan dengan 1 paket.	55.000.000,-	54.196.100,-
17	Kegiatan Penunjang perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka	55.000.000,-	54,983.000,-

perencanaan, pengendalian, dan pengawasan penugasan		
---	--	--

Sumber : Realisasi DAK Bulan Desember Tahun 2021

**REKOMENDASI SASARAN 1:**

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai stakeholder serta peningkatan anggaran yang cukup untuk mendukung Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.

**MISI 3 RPJMD : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Ekonomi Kerakyatan**

**SASARAN 2 SKPD : Meningkatkan Pertumbuhan Produksi perikanan Pada Sektor Perikanan (tangkap, budidaya dan olahan hasil perikanan)**

Dalam sasaran ini terdapat satu (1) indikator kinerja utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan /formula tertentu. Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama akan diuraikan pada tabel 6 (Enam) berikut :

Tabel 8. Indikator Kinerja Pada Sasaran 2. Meningkatnya pertumbuhan Produksi sektor perikanan tangkap, budidaya dan olahan hasil perikanan

URAIAN	SATUAN	TARGET TA.2021	REALISASI		CAPAIAN 2021
			TA. 2020	TA. 2021	
Meningkatnya Pertumbuhan Produksi Perikanan pada Sektor Perikanan Tangkap, Budidaya dan Olahan Hasil Perikanan	%	1,55 %	1,135 %	1,55 %	100%

Sumber : Data statistik Perikanan Tahun 2021



Sehubungan dengan seluruh data PDRB dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara setiap akhir bulan Februari di Tahun berikutnya, maka untuk sementara data realisasi dan capaian PDRB sektor perikanan berdasarkan hasil koordinasi dengan Bagian ORTALA Setdakab Bengkulu Utara menggunakan data PDRB Tahun 2021. Namun demikian, Dinas Perikanan Bengkulu Utara tetap optimis PDRB Tahun 2021 dapat mencapai target sebesar 1,55 % .

Adapun kendala yang dihadapi dalam peningkatan pertumbuhan Produksi perikanan di tahun 2021 adalah munculnya wabah covid -19 dan diikuti oleh refocusing kegiatan sehingga berkurangnya anggaran APBD murni SKPD.

Adapun kendala yang dihadapi dalam peningkatan nilai/predikat AKIP SKPD Dinas perikanan Bengkulu Utara di tahun 2021 adalah munculnya wabah covid -19 dan diikuti oleh refocusing kegiatan sehingga berkurangnya anggaran di APBD murni SKPD.

Adapun kiat-kiat Dinas Perikanan dalam usaha meningkatkan nilai predikat AKIP SKPD di Tahun 2021 adalah Dinas Perikanan melakukan review SAKIP dan terus berkoordinasi melalui ORTALA serta melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan oleh KEMENPAN RB sebagai berikut :

## TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

### REKOMENDASI

### TINDAK LANJUT

Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran (cascade down) kinerja, mulai dari level pimpinan tingkat atas sampai dengan indikator kinerja di level individu pegawai staf;

Telah disusunnya Reviu Cascade Perjanjian Kinerja Kepala Dinas sampai ke staf

Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada tujuan dan sasaran. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran;

Telah dilakukannya reviu RENSTRA untuk pencapaian sasaran strategis Dinas Perikanan tersebut

Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja sehingga mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja untuk monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan, agar mampu mewujudkan efektivitas program kerja organisasi dalam pencapaian kinerja organisasi;

Telah dilakukannya Reviu Pengukuran kinerja di lingkungan Dinas Perikanan sesuai dengan TUPOKSINYA sehingga lebih mengandalkan pada pengukuran keberhasilan atau kegagalan kegiatan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkatan Pimpinan level atas sampai dengan staf

Sedangkan untuk progres perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

## **PROGRES PERBAIKAN DAN EVALUASI AKIP DINAS PERIKANAN KAB. BENGKULU UTARA**



Adapun Program dan kegiatan pendukung pelaksanaan sasaran ke -

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dapat dilihat pada tabel 9 (sembilan) adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Program dan Kegiatan pendukung pelaksanaan sasaran ke -2 (dua).  
Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PAGU(Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.161.030,-	27.161.030,-

*Sumber : Laporan Realisasi Fisik Keuangan Dinas Perikanan Tahun 2021*

**REKOMENDASI SASARAN 2 :**

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai stakeholder serta peningkatan anggaran yang cukup untuk mendukung Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.

**B. Akuntabilitas Keuangan**

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, harus didukung dengan anggaran yang memadai serta dapat dipertanggung-jawabkan penggunaannya. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayan public, alokasi belanja diupayakan agar efisien, efektif dan profesional. Belanja dikelompokkan kedalam belanja langsung dan belanja tidak langsung yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat. Adapun sumber anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021 bersumber dari APBD/DAK, untuk mengetahui besaran realisasinya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 10. Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan APBD

Tabel 11 . Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan DAK

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Dinas Perikanan ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Dinas Perikanan menuju good governance dengan mengacu pada Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan mengacu pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor perikanan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada usaha yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target indikator tiap sasaran, meskipun sampai saat ini hasilnya belum diketahui dikarenakan masih menunggu keluaran data PDRB Kabupaten dari Badan Pusat Statistik Bengkulu Utara.

#### **B. Saran-Saran**

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

- Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara, maka perlu

dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.

- Untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang sulit dilakukan oleh Dinas Perikanan Bengkulu Utara perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai stakeholder, dan mengusulkan anggaran yang cukup untuk mendukung Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.



# LAMPIRAN

## **PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021**

Unit Kerja : Dinas Perikanan Bengkulu Utara  
Tahun Anggaran : 2021

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Meningkatnya Kinerja Pembinaan Akuntabilitas kinerja	Nilai/predikat AKIP SKPD	BB	B	-	Realisasi yang digunakan adalah capaian Tahun 2021 masih menggunakan data yang lama dikarenakan data terbaru belum di edarkan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara.
2	Meningkatnya pertumbuhan Produksi Pada sektor perikanan tangkap, budidaya dan produk olahan perikanan	Persentase pertumbuhan Produksi Perikanan Pertahun	1,55 %	1,55 %	100%	Realisasi yang digunakan adalah sesuai dengan data statistik Dinas Perikanan Tahun 2021.

**REKAFITULASI CAPAIAN KEUANGAN  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKULU UTARA  
TAHUN 2021**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / JENIS BELANJA	LOKASI KEGIATAN	KEUANGAN				
			PAGU ANGGARAN	NILAI KONTRAK	REALISASI KEUANGAN		SISA DANA
					Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>		<b>3,545,908,100</b>		<b>3,051,874,272</b>		<b>494,033,828</b>
	<b>1 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>		<b>57,395,815</b>	-	<b>55,103,836</b>	<b>96.01</b>	<b>2,291,979</b>
	<b>a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah</b>	<b>Kab. BU</b>	<b>24,493,175</b>		<b>22,785,336</b>	<b>93.03</b>	<b>1,707,839</b>
	* Belanja Operasi		24,493,175		22,785,336		1,707,839
	1) Belanja Pegawai		-				-
	2) Belanja Barang Jasa		24,493,175		22,785,336		1,707,839
	3) Belanja Modal		-				-
	* Belanja Modal		-				-
	1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
	2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan						
	<b>b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>Kab. BU</b>	<b>3,139,719</b>	-	<b>3,104,700</b>	<b>98.88</b>	<b>35,019</b>
	* Belanja Operasi		3,139,719		3,104,700		35,019
	1) Belanja Pegawai						
	2) Belanja Barang Jasa		3,139,719		3,104,700		35,019
	3) Belanja Modal						
	* Belanja Modal						
	1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
	2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan						

	<b>c.</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</b>	<b>Kab. BU</b>	<b>1,676,291</b>	<b>-</b>	<b>1,643,800</b>	<b>98.06</b>	<b>32,491</b>
	*	Belanja Operasi		1,676,291		1,643,800		32,491
		1) Belanja Pegawai						
		2) Belanja Barang Jasa		1,676,291		1,643,800		32,491
		3) Belanja Modal			-			
	*	Belanja Modal						
		1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
		2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan						
	<b>d.</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</b>	<b>Kab. BU</b>	<b>925,600</b>	<b>-</b>	<b>898,000</b>	<b>97.02</b>	<b>27,600</b>
	*	Belanja Operasi		925,600		898,000		27,600
		1) Belanja Pegawai						
		2) Belanja Barang Jasa		925,600		898,000		27,600
		3) Belanja Modal			-			
	*	Belanja Modal						
		1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
		2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan						
	<b>e.</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>Kab. BU</b>	<b>27,161,030</b>	<b>-</b>	<b>26,672,000</b>	<b>98.20</b>	<b>489,030</b>
	*	Belanja Operasi		27,161,030		26,672,000		489,030
		1) Belanja Pegawai		13,800,000		13,800,000		-
		2) Belanja Barang Jasa		13,361,030		12,872,000		489,030
		3) Belanja Modal			-			
	*	Belanja Modal						
		1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
		2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan						

NO	PROGRAM / KEGIATAN / JENIS BELANJA	LOKASI KEGIATAN	KEUANGAN				
			PAGU ANGGARAN	NILAI KONTRAK	REALISASI KEUANGAN		SISA DANA
					Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>3,062,966,533</b>		<b>2,584,060,411</b>	<b>84.36</b>	<b>478,906,122</b>
	<b>a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>Kab. BU</b>	<b>3,002,352,472</b>		<b>2,524,652,911</b>	<b>84.09</b>	<b>477,699,561</b>
	* Belanja Operasi		3,002,352,472	-	2,524,652,911		477,699,561
	1) Belanja Pegawai		3,002,352,472		2,524,652,911		477,699,561
	2) Belanja Barang Jasa						
	3) Belanja Modal		-				-
	* Belanja Modal		-	-			-
	1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
	2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan						
	<b>b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>Kab. BU</b>	<b>60,614,061</b>		<b>59,407,500</b>	<b>98.01</b>	<b>1,206,561</b>
	* Belanja Operasi		60,614,061		59,407,500		1,206,561
	1) Belanja Pegawai		59,400,000		58,200,000		1,200,000
	2) Belanja Barang Jasa		1,214,061		1,207,500		6,561
	3) Belanja Modal			-			
	* Belanja Modal						
	1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
	2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan						
	<b>3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>39,550,000</b>		<b>39,050,000</b>	<b>98.74</b>	<b>500,000</b>
	<b>a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	<b>Kab. BU</b>	<b>39,550,000</b>	-	<b>39,050,000</b>	<b>98.74</b>	<b>500,000</b>
	* Belanja Operasi		39,550,000		39,050,000		500,000
	1) Belanja Pegawai		39,550,000		39,050,000		500,000
	2) Belanja Barang Jasa						

	3) Belanja Modal						
*	Belanja Modal				-	-	
	1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin				-		
	2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan						
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>121,894,347</b>		<b>116,920,186</b>	<b>95.92</b>	<b>4,974,161</b>
<b>a.</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>Kab. BU</b>	<b>76,544,748</b>		<b>74,438,400</b>	<b>97.25</b>	<b>2,106,348</b>
*	Belanja Operasi		76,544,748		74,438,400		2,106,348
	1) Belanja Pegawai		10,800,000		10,400,000		400,000
	2) Belanja Barang Jasa		65,744,748		64,038,400		1,706,348
	3) Belanja Modal				-		
*	Belanja Modal						
	1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
	2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan						
<b>b.</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan</b>	<b>Kab. BU</b>	<b>5,102,691</b>		<b>4,898,750</b>	<b>96.00</b>	<b>203,941</b>
*	Belanja Operasi		5,102,691		4,898,750		203,941
	1) Belanja Pegawai						
	2) Belanja Barang Jasa		5,102,691		4,898,750		203,941
	3) Belanja Modal				-		
*	Belanja Modal						
	1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
	2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan						
<b>c.</b>	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>Kab. BU</b>	<b>7,810,908</b>		<b>7,800,000</b>	<b>99.86</b>	<b>10,908</b>
*	Belanja Operasi		7,810,908		7,800,000		10,908
	1) Belanja Pegawai						
	2) Belanja Barang Jasa		7,810,908		7,800,000		10,908
	3) Belanja Modal						
*	Belanja Modal						
	1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin						

		2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan					
<b>d.</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>Kab. BU</b>	<b>32,436,000</b>		<b>29,783,036</b>	<b>91.82</b>	<b>2,652,964</b>
*	Belanja Operasi		32,436,000		29,783,036		2,652,964
	1) Belanja Pegawai						
	2) Belanja Barang Jasa		32,436,000		29,783,036		2,652,964
	3) Belanja Modal						
*	Belanja Modal			-			
	1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
	2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan						
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>14,770,500</b>		<b>14,768,600</b>	<b>99.99</b>	<b>1,900</b>
<b>a.</b>	<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>Kab. BU</b>	<b>14,770,500</b>		<b>14,768,600</b>	<b>99.99</b>	<b>1,900</b>
*	Belanja Operasi						
	1) Belanja Pegawai						
	2) Belanja Barang Jasa						
	3) Belanja Modal						
*	Belanja Modal		14,770,500		14,768,600		1,900
	1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin		14,770,500		14,768,600		1,900
	2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan			-			
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>177,274,093</b>		<b>175,018,769</b>	<b>98.73</b>	<b>2,255,324</b>
<b>a.</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>Kab. BU</b>	<b>29,674,093</b>		<b>28,218,769</b>	<b>95.10</b>	<b>1,455,324</b>
*	Belanja Operasi		29,674,093		28,218,769		1,455,324
	1) Belanja Pegawai						
	2) Belanja Barang Jasa		29,674,093	-	28,218,769		1,455,324
	3) Belanja Modal						

	*	Belanja Modal					
		1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
		2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan			-		
	<b>b.</b>	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>Kab. BU</b>	<b>147,600,000</b>		<b>146,800,000</b>	<b>99.46</b> <b>800,000</b>
	*	Belanja Operasi		147,600,000		146,800,000	800,000
		1) Belanja Pegawai					
		2) Belanja Barang Jasa		147,600,000		146,800,000	800,000
		3) Belanja Modal					
	*	Belanja Modal					
		1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
		2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan					
	<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>72,056,812</b>		<b>66,952,470</b>	<b>92.92</b> <b>5,104,342</b>
	<b>a.</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan</b>	<b>Kab. BU</b>	<b>36,967,272</b>		<b>35,724,770</b>	<b>96.64</b> <b>1,242,502</b>
	*	Belanja Operasi		36,967,272		35,724,770	1,242,502
		1) Belanja Pegawai					
		2) Belanja Barang Jasa		36,967,272		35,724,770	1,242,502
		3) Belanja Modal					
	*	Belanja Modal					
		1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
		2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan					
	<b>b.</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>Kab. BU</b>	<b>24,997,000</b>		<b>21,139,500</b>	<b>84.57</b> <b>3,857,500</b>
	*	Belanja Operasi		24,997,000		21,139,500	3,857,500
		1) Belanja Pegawai					
		2) Belanja Barang Jasa		24,997,000		21,139,500	3,857,500



	3) Belanja Modal						
*	Belanja Modal						
	1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
	2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan						
<b>c.</b>	<b>Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>Kab. BU</b>	<b>10,092,540</b>		<b>10,088,200</b>	<b>99.96</b>	<b>4,340</b>
*	Belanja Operasi		10,092,540		10,088,200	<b>99.96</b>	4,340
	1) Belanja Pegawai						
	2) Belanja Barang Jasa		10,092,540		10,088,200	<b>99.96</b>	4,340
	3) Belanja Modal						
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		<b>630,231,459</b>		<b>628,072,000</b>	-	<b>2,159,459</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>630,231,459</b>		<b>628,072,000</b>	<b>99.66</b>	<b>2,159,459</b>
<b>a.</b>	<b>Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap</b>	<b>Kab. BU</b>	<b>424,800,000</b>		<b>423,038,000</b>	<b>99.59</b>	<b>1,762,000</b>
*	Belanja Operasi			424,800,000		423,038,000	1,762,000
	1) Belanja Pegawai		4,800,000		4,800,000	-	-
	2) Belanja Barang Jasa		20,000,000	-	19,983,000		17,000
	3) Belanja Hibah			400,000,000		398,255,000	1,745,000
*	Belanja Modal		-				-
	1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
	2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan						
<b>b.</b>	<b>Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap</b>	<b>Kab. BU</b>	<b>205,431,459</b>		<b>205,034,000</b>	<b>99.81</b>	<b>397,459</b>
*	Belanja Operasi		22,931,459	-	22,837,000		94,459
	1) Belanja Pegawai		15,000,000		15,000,000		-

	2) Belanja Barang Jasa		7,931,459		7,837,000		94,459
	3) Belanja Modal						
	* Belanja Modal		182,500,000		182,197,000		303,000
	1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
	2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan		182,500,000	-	182,197,000		303,000
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		<b>862,692,884</b>		<b>856,758,920</b>		<b>5,933,964</b>
	<b>1 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>		<b>862,692,884</b>		<b>856,758,920</b>	<b>99.31</b>	<b>5,933,964</b>
	<b>a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. BU</b>	<b>845,400,000</b>		<b>839,474,400</b>	<b>99.30</b>	<b>5,925,600</b>
	* Belanja Operasi			845,400,000		839,474,400	5,925,600
	1) Belanja Pegawai			5,400,000	-	5,400,000	-
	2) Belanja Barang Jasa		180,000,000		180,000,000		-
	3) Belanja Hibah		660,000,000		654,074,400		5,925,600
	* Belanja Modal			-			-
	1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin			-			
	2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan						
	<b>b. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat</b>	<b>Kab. BU</b>	<b>17,292,884</b>		<b>17,284,520</b>	<b>99.95</b>	<b>8,364</b>
	* Belanja Operasi				17,284,520		

			17,292,884				8,364
	1) Belanja Pegawai		12,600,000			12,600,000	-
	2) Belanja Barang Jasa		4,692,884			4,684,520	8,364
	3) Belanja Hibah						
	* Belanja Modal						
	1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
	2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan						
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>		<b><u>24,093,862</u></b>			<b><u>23,574,700</u></b>	<b><u>519,162</u></b>
	<b>1 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>24,093,862</b>			<b>23,574,700</b>	<b>97.85 519,162</b>
	<b>a. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. BU</b>	<b>24,093,862</b>			<b>23,574,700</b>	<b>97.85 519,162</b>
	1) Belanja Pegawai		10,200,000			10,200,000	-
	2) Belanja Barang Jasa			13,893,862			13,374,700
	3) Belanja Hibah						
	* Belanja Modal						
	1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
	2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan						
	<b>JUMLAH</b>		<b>5,062,926,305</b>			<b>4,560,279,892</b>	<b>90.07 502,646,413</b>

**Lampiran Gambar/ foto Kegiatan**